

## PERFORMA PENGELOLAAN AGROFORESTRI DI WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG RAJABASA

*Performance Of Agroforestry Management  
In The Area Of Rajabasa Protected Forest Management Unit*

**Lia Mulyana, Indra Gumay Febryano, Rahmat Safe'i, dan Irwan Sukri Banuwa**

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung  
Jln. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung

**ABSTRACT.** Community-based forest management program provides the access for communities to participate in managing state forests. One of them is conducted through agroforestry planting pattern in village forest. The purpose of this research is to know the performance of agroforestry management on land managed by Sumur Kumbang village community in Protected Forest Management Area of Rajabasa. The data collection was got through by interview and observation; the data obtained were analyzed descriptively. The results show the performance of agroforestry management in protected forest management area of Rajabasa in moderate performance (productivity 84, sustainability 167, fairness benefit 88, and efficiency 168). Such performance is influenced by forest management system, ie controlled lands and individually controlled forest products; agroforestry business orientation is commercial; and forest structure is a complex agroforestry. Therefore, the Protected Forest Management Unit of Rajabasa and related stakeholders should develop community capacity and strengthen local institutions continuously so that their forests can be managed in a fair, beneficial, and sustainable way.

**Keyword :** agroforestry; village forest; protected forest management unit; performance.

**ABSTRAK.** Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengelola hutan negara; salah satunya dilakukan melalui pola tanam agroforestri di hutan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui performa pengelolaan agroforestri pada lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat Desa Sumur Kumbang di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rajabasa. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan performa pengelolaan agroforestri di wilayah KPHL Rajabasa dalam performa sedang (produktivitas 84; keberlanjutan 167; keadilan manfaat 88; dan efisiensi 168). Performa tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan hutannya, yaitu penguasaan lahan dan hasil hutan yang dikuasai secara individu, orientasi usaha agroforestri bersifat komersial, dan struktur hutan merupakan agroforestri kompleks. Oleh karena itu, KPHL Rajabasa serta *stakeholder* terkait harus mengembangkan kapasitas masyarakat dan menguatkan kelembagaan lokal secara terus menerus, sehingga hutannya dapat dikelola secara adil, bermanfaat, dan berkelanjutan.

**Kata kunci :** agroforestri; Hutan Desa; KPHL; performa.

**Penulis untuk korespondensi, surel :** [liamulyan@gmail.com](mailto:liamulyan@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah banyak dilakukan dan diterapkan di hutan negara. Abdurrahim (2015) mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan hutan melalui program-program kehutanan masyarakat. Menurut Suharjo *et al.* (2013) peran masyarakat lokal dapat memecahkan masalah krisis lingkungan hidup dan kemiskinan. Adapun salah satu program kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui kelembagaan lokal adalah hutan desa. Bentuk pengelolaan lahan pada program tersebut menggunakan pola tanam agroforestri.

Di sisi lain pengelolaan agroforestri yang dilakukan masyarakat melalui kelembagaan lokal tersebut di berbagai daerah memiliki performa yang berbeda-beda; padahal performanya menurut Suharjo *et al.* (2000) sangat terkait dengan produktivitas dari pendapatan usaha dari pengelolaan hutan, keberlanjutan untuk mempertahankan kelestarian hutan, keadilan manfaat dalam penguasaan lahan dan hasil agroforestri, dan efisiensi dalam kelembagaan. Studi yang dilakukan Febryano *et al.* (2014) menunjukkan bagaimana keberadaan kelembagaan lokal mendorong masyarakat melakukan tindakan kolektif dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui performa pengelolaan agroforestri di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagai pengelola di tingkat tapak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performa pengelolaan agroforestri pada lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat Desa Sumur Kumbang di wilayah KPHL Rajabasa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2016 di Hutan Desa yang berada di wilayah KPHL Rajabasa. Hutan Desa tersebut dikelola oleh masyarakat Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Penentuan sampel menggunakan dua cara yaitu *purposive* dan *random sampling*. *Purposive sampling* ditujukan untuk ketua dan pengurus LPHD Sumur Kumbang. *Random sampling* ditujukan untuk anggota LPHD Sumur Kumbang; dimana penentuan jumlah respondennya dilakukan menggunakan rumus Slovin (Arikunto 2011), yaitu sebanyak 38 responden yang mewakili anggota LPHD yang berjumlah 277 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis performa agroforestrinya. Hasilnya disajikan dalam suatu matriks yang menjelaskan hubungan antara variabel sistem pengelolaan hutan dan performa agroforestrinya (Suharjo *et al.* 2000). Data performa agroforestri dinilai berdasarkan pengukuran di dalam kelompok LPHD Sumur Kumbang. Hasil pengukurannya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Pengategorian tersebut menggunakan interval kelas yang dihitung dengan cara skor maksimum dikurangi dengan skor minimum dibagi jumlah kelas (Sugiyono 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pengelolaan hutan di wilayah KPHL Rajabasa yang dikelola oleh masyarakat Desa Sumur Kumbang mempengaruhi performa agroforestri. Performa agroforestri meliputi: produktivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat, dan efisiensi; sementara variabel sistem pengelolaan terdiri atas penguasaan lahan dan hasil hutan, orientasi agroforestri, dan struktur hutan (Tabel 1).

**Tabel 1. Matriks hubungan antara variabel sistem pengelolaan hutan dan performanya**

No	Variabel sistem pengelolaan Produktivitas		Performa			
			Keberlanjutan	Keadilan manfaat	Efisiensi	
1	Penguasaan lahan dan hasil hutan	Individual	+	+	+	+
2	Orientasi	Komunal				
		Subsisten				
		Komersial	+	+	+	+
		Monokultur				
3	Struktur hutan	Agroforest				
		Kompleks	+	+	+	+

Keterangan: + = adanya hubungan antara performa dan sistem pengelolaan hutan

Sumber: Hasil penelitian, 2016

Lahan yang dikelola oleh masyarakat Desa Sumur Kumbang di wilayah KPHL Rajabasa merupakan hutan negara. KPHL Rajabasa ditetapkan oleh pemerintah sebagai pengelola di tingkat tapak melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 367/Menhut-II/2011 tentang Penetapan KPHL Model Gunung Rajabasa. Pembentukan KPHL Model Gunung Rajabasa disahkan oleh Bupati Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHL Gunung Rajabasa dengan luas wilayah 5.160 ha.

KPHL Rajabasa dahulu merupakan Register 3 Gunung Rajabasa yang ditetapkan berdasarkan Besluit Residen Lampung No. 307 Tahun 1941 Tanggal 31 Maret 1941 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan luas wilayah 4.900 ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung, Register 3 Gunung Rajabasa ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dengan luas 5.200,50 ha atau 19,6 % dari total luas hutan di Kabupaten Lampung Selatan.

Wilayah KPHL Rajabasa berbatasan langsung dengan desa-desa di sekelilingnya. Desa Sumur Kumbang merupakan salah satu dari 22 desa tersebut. Desa Sumur Kumbang memiliki luas wilayah 378 ha dengan masyarakat yang didominasi

oleh Suku Lampung dan Sunda Banten. Sebagian besar Masyarakat Desa Sumur Kumbang adalah petani, sehingga mereka memiliki ketergantungan sangat tinggi pada wilayah KPHL Rajabasa. Oleh karena itu, pemerintah memberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 403/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa kepada masyarakat Desa Sumur Kumbang untuk mengelola wilayah KPHL Rajabasa seluas 217 ha dengan pola agroforestri. Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) tersebut berupa izin mengelola lahan hutan dan mengambil hasilnya.

Pengelolaan lahan hutan dilakukan secara individu berdasarkan luas yang dikelola secara turun temurun oleh masyarakat, namun izin HPHD yang diberikan pemerintah tetap melalui LPHD. LPHD berhak mengambil keputusan dalam pengelolaan agroforestri dengan cara musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan meliputi: pemilihan komposisi jenis tanaman, perbanyak jenis tanaman, tata batas kawasan dan pengembangan usaha agroforestri yang tertuang dalam Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKHPHD).

Orientasi dalam pengelolaan agroforestri sebagian besar bersifat komersial tetapi, ada juga yang subsisten. Sebagian besar hasil panen seperti kakao, damar, pisang, alpukat, jengkol, petai, melinjo, cengkeh, kopi, durian, cabai, aren, dan pinang diorientasikan untuk dijual. Namun, ada juga sebagian anggota masyarakat yang memilih tidak menjual hasil panennya seperti kopidan cabai untuk dikonsumsi sendiri. Durian kurang laku

dijual karena rasanya yang tidak manis. Hasil panen lainnya seperti bumbu dapur lebih bersifat subsisten. Masyarakat biasanya menjual hasil panen agroforestri kepada pengepul, dijual di pasar Kalianda, atau dijual dengan cara borongan. Penjualan dengan cara borongan di batang biasanya dilakukan ketika masyarakat sangat membutuhkan uang dan kualitas hasil panennya kurang baik.

Struktur hutan yang dikelola oleh masyarakat Desa Sumur Kumbang di wilayah KPHL Rajabasa merupakan agroforest kompleks. Agroforestri tersebut terbentuk melalui pembukaan lahan hutan oleh masyarakat. Tahun pertama mereka mulai berhuma menanam padi gogo, palawija, sayur-sayuran, kopi, lada, dan durian di tahun 1950. Bibit durian tersebut diperoleh dari pohon durian di kawasan yang sudah ada sejak tahun 1930. Masyarakat mulai memperkaya tanaman di lahan kelolanya dengan pohon damar pada tahun 1960. Hal tersebut menunjukkan bahwa agroforestri yang terbentuk, menurut De Foresta *et al.* (2000) merupakan agroforestri kompleks.

Ketergantungan masyarakat terhadap lahan hutan semakin tinggi, sehingga lahan kelola baru semakin banyak dibuka dari tahun ke tahun. Pohon damar diganti dengan tanaman kopi dan pohon cengkeh di tahun 1972. Hasil dari kopi dan cengkeh belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga mereka menanam petai di tahun 1974-1975. Selain memanfaatkan hutan untuk berkebun, masyarakat juga bermukim di kawasan. Keadaan tersebut membuat pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan Rehabilitasi Lahan Hutan (RHL) melalui penanaman bibit sonokeling dan kaliandra di KPHL Rajabasa pada tahun 1980-1981.

Pemerintah melanjutkan upayanya dalam memperbaiki kawasan hutan dengan merelokasi masyarakat yang berkebun dan bermukim di wilayah KPHL Rajabasa pada tahun 1982-1983. Sejak saat itu masyarakat tidak diizinkan lagi bermukim di kawasan tersebut; namun mereka tetap diperbolehkan mengelola lahan dengan menanam jenis tanaman serba guna atau yang sering disebut *Multi Purpose Trees Species* (MPTS). Masyarakat memperbanyak menanam tanaman musiman, dan tanaman lainnya agar hasilnya dapat diambil setiap saat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka menanam kakao dan pisang pada tahun 2005 sebagai salah satu tanaman utama di lahan kelolanya hingga saat ini.

Masyarakat lebih mengenal agroforestri dengan istilah kebun serba ada atau kebun *super market* yang didominasi dengan tanaman utama yaitu, kopi, kakao, pisang, yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan yakni durian, melinjo, cengkeh, dan petai. Tanaman lainnya adalah, alpukat, gantung, kahiyang, aren, jengkol, damar, pinang, lada, pala, bambu, randu, dadap, nangka, sonokeling, kemiridan kaliandra. Tanaman tersebut sebagian tumbuh secara alami dan sebagian lagi dibudidayakan oleh pemiliknya. Tanaman kakao dan kopi ditanam diantara pohon durian dan petai, atau tangkil dan petai, serta damar dan tangkil. Tanaman bawah seperti cabai ditanam disela-sela tanaman yang masih memperoleh cahaya matahari atau di bawah tanaman kopi.

Performa pengelolaan agroforestri yang dilakukan LPHD Desa Sumur Kumbang di wilayah KPHL Rajabasa termasuk kategori sedang. Performa tersebut berdasarkan hasil penilaian terhadap variabel produktivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat, dan efisiensi (Tabel 2).

**Tabel 2. Performa agroforestri di wilayah KPHL Rajabasa**

No.	Variabel	Interval kelas			Skor	Keterangan
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Produktivitas	29-75	75-121	121-167	84	Sedang
2	Keberlanjutan	26-99	99-171	171-244	167	Sedang
3	Keadilan manfaat	32-87	87-142	142-197	88	Sedang
4	Efisiensi	41-122	122-204	204-285	168	Sedang

Sumber : Hasil penelitian, 2016

Produktivitas agroforestri tergolong ke dalam kategori sedang. Hal ini sangat terkait dengan pendapatan dari pengelolaan agroforestri yang berkisar antara Rp 2.710.000 sampai dengan Rp 48.560.000, dengan nilai rata-rata sebesar Rp 12.181.615. Produktivitas dari hasil panen agroforestri dipengaruhi oleh komoditas utama yang ditanam masyarakat di lahan kelolanya, yaitu kakao, kopi, durian, pisang, melinjo, damar, dan alpukat. Kegagalan panen yang terjadi pada beberapa komoditas utama tersebut mengakibatkan pendapatan sebagian masyarakat menjadi rendah. Penyebabnya adalah penyakit yang menyerang tanaman kakao, hama monyet yang menyerang tanaman pisang, dan hama ulat yang menyerang batang pohon petai. Selain hama dan penyakit, rasa buah durian yang kurang sesuai dengan selera pembeli turut menurunkan harga jualnya. Disisi lain sebagian masyarakat yang menanam kopi sebagai komoditas utamanya memperoleh pendapatan yang tinggi. Safe'i (2015) menjelaskan bahwa produktivitas dapat mencerminkan tingkat kesehatan hutan dan keberhasilan pengelolaan hutan.

Keragaman tingkat pendapatan agroforestri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu strategi pengembangan untuk meningkatkan produksi yang meliputi: komposisi jenis tanaman, umur tanaman, tingkat produktivitas tanaman, dan jarak tanam pada tanaman. Tanaman yang jarak tanamnya terlalu sempit akan membuat pertumbuhannya tidak optimal. Faktor lainnya yaitu pemeliharaan yang terkait dengan pembersihan lahan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta penyulaman. Pemetikan buah kopi dan kakao yang tingkat kematangannya belum merata mempengaruhi kualitas hasil panennya. Keragaman tingkat pendapatan juga dipengaruhi oleh sistem pemasaran hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat. Terdapat perbedaan harga antara komoditi yang dijual oleh masyarakat ke pengepul, ke pasar atau dengan cara borongan.

Pengolahan pasca panen seperti pengeringan buah atau pembuatan produk olahan juga merupakan faktor penting dalam produktivitas. Pengeringan buah sudah dilakukan seperti pengeringan biji kakao

dan kopi; namun kegiatan membuat produk olahan pasca panen belum dilakukan karena masyarakat belum mengetahui cara membuat produk olahan tersebut. Menurut Suharjito (2014) pengolahan produk pasca panen atau industri kehutanan skala kecil, skala rumah tangga, yang beroperasi di pedesaan dapat membantu dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

Tingkat keberlanjutan agroforestri termasuk dalam kategori sedang. Anggota LPHD telah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan agroforestri dan menjaga fungsi hutan. Upaya yang dilakukan diantaranya yaitu melakukan perbanyak tanaman dengan budidaya tanaman, penyemaian, pembibitan, peremajaan, dan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan dengan melakukan pembersihan dan pembabatan rumput pengganggu serta penebasan ranting dan dahan yang sudah rimbun, biasanya dilakukan 4 bulan sekali. Kegiatan lainnya yaitu penyulaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Penerapan pola agroforestri memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat. Secara ekologis agroforestri memberikan manfaat mencegah timbulnya erosi. Tanaman dengan tajuk yang tinggi bisa menjadi pelindung bagi tanaman bawah dan mempertahankan keberadaan mata air di kawasan hutan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Van Noordwijk *et al.* (2004) bahwa berbagai bentuk agroforestri di hutan lindung atau repong yang telah banyak dipraktikkan masyarakat dapat mempertahankan fungsi hidrologinya.

Tingkat keadilan manfaat tergolong ke dalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari distribusi luas lahan yang dikelola oleh setiap anggota LPHD mulai dari 0,25 sampai dengan 3 ha per keluarga. Tidak ada kesepakatan atau aturan tertulis yang mengatur pembagian luas lahan yang dikelola. Aturan tertulis di dalam peraturan Desa Sumur Kumbang tentang hutan desa hanya menjelaskan bahwa masyarakat boleh mengelola lahan di kawasan hutan dengan ketentuan hanya lahan yang sudah terlanjur dikelola. Lahan tersebut biasanya merupakan lahan pengelola yang diwariskan secara turun temurun.

Keadilan manfaat juga dapat dilihat dari distribusi manfaat dari hasil agroforestri yang diterima masyarakat sekitar hutan yang tidak memiliki lahan atau lahannya sedikit. Hal ini terlihat dari direkrutnya mereka menjadi tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan dan pemanenan. Tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan diberi upah sesuai dengan kesepakatan. Manfaat tersebut juga dinikmati oleh tengkulak atau pembeli. Masyarakat yang tidak memiliki lahan kelola dan tidak ikut dalam kegiatan pengelolaan agroforestri tidak dapat merasakan produk/hasil dari agroforestri tersebut. Studi yang dilakukan Mulyono (2012) di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa keadilan manfaat dapat dikatakan tinggi jika terjadi pemerataan distribusi manfaat serta keuntungan profit hasil kebun hutan (*dukuh*) antara pemilik kebun dengan masyarakat yang tidak memiliki kebun. Hal tersebut juga didukung oleh Santoso (2011) bahwa pemerataan manfaat di masyarakat (ekuitas sosial) menjadi jaminan keberhasilan kehutanan masyarakat.

Tingkat efisiensi tergolong ke dalam kategori sedang. Dari sisi kelembagaan, ada aturan-aturan formal dan informal yang diterapkan oleh masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. LPHD Sumur Kumbang telah memiliki aturan main (*rule of the game*) serta batasan kewenangan (*jurisdictional boundaries*) yang jelas dalam pengelolaan hutan desa. Aturan formal ini berupa Peraturan Desa Sumur Kumbang tentang Pengelolaan Hutan Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LPHD yang mengatur hak dan kewajiban anggota LPHD. Seluruh pengurus dan anggota LPHD diberikan kesempatan untuk menuangkan segala bentuk pemikirannya baik tanggapan, saran maupun sanggahan dalam penyusunan peraturandesa, pembentukan AD/ART dan rencana kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).

Dalam peraturan Desa Sumur Kumbang tentang Hutan Desa disebutkan bahwa anggota LPHD memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara sumber daya hutan serta mencegah, melarang dan melaporkan kepada LPHD dan pihak yang berwenang apabila terdapat kegiatan

yang merusak sumber daya hutan. Kewajiban tersebut telah mereka lakukan seperti saat terjadi pencabutan bibit pohon dan tindakan yang menyebabkan kematian pohon di kawasan KPHL Rajabasa. Anggota LPHD melaporkan pelanggaran tersebut kepada Ketua LPHD, KPHL Rajabasa, dan Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan; namun penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran tersebut belum berjalan.

Selain aturan formal di atas ada aturan informal yang sudah sejak lama berlaku di masyarakat Desa Sumur Kumbang. Aturan tersebut berupakesepakatan dalam penentuan tanda batas lahan kelola berupa: tumbuhan liar yang merambat seperti liana dan/atau pinang, jarak, kedondong, dan/atau damar. Tanda batas tersebut biasanya disepakati oleh masyarakat secara turun-temurun sehingga mereka saling menjaga lahan kelolanya secara keseluruhan. Studi yang dilakukan Salampessy *et al.* (2012) di Maluku menjelaskan, bahwa batas areal lahan agroforestri tradisional seperti dusung ditandai dengan tanaman, pohon, atau batu. Selain itu, pengamanan hutan juga dilakukan oleh masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan dalam kegiatan yang dinamakan Mitra Polhut. Tujuannya untuk memastikan hutan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan meningkatnya kekritisian lahan dan pembukaan lahan baru.

Aturan informal lainnya berupa kearifan lokal yang dikenal dengan istilah ritual ruwat bumi. Ruwat bumi atau peperahan merupakan kegiatan berdoa dan makan bersama yang dilakukan seluruh masyarakat sebagai rasa syukur terhadap bumi yang telah memberikan hasil panen yang berlimpah. Kegiatan ini memberikan pesan dan kesadaran kepada masyarakat agar tetap menjaga sumber daya hutan dan membatasi penggunaannya agar tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Kearifan lokal berikutnya adalah pamali yang merupakan bentuk larangan seperti tidak boleh menebang pohon dengan alat atau senjata tajam. Penebangan pohon juga hanya boleh dilakukan terhadap pohon milik sendiri dengan cara mematahkannya saja. Hal ini sejalan

dengan penjelasan Van Noordwijk *et al.* (2004) bahwa petani memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang memadai dalam pengelolaan sumber daya alam.

## SIMPULAN

Performa pengelolaan agroforestri di wilayah KPHL Rajabasaberupa variabel produktivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat dan efisiensi termasuk dalam kategori sedang. Performa agroforestri tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan hutannya yang terdiri atas penguasaan lahan dan hasil hutan yang dikuasai secara individu, orientasi dalam agroforestri bersifat komersial dan struktur hutan adalah agroforestri kompleks. KPHL Rajabasa serta *stakeholder* terkait harus melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal agar pengelolaan agroforestri dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, meningkatkan distribusi sumber daya hutan secara adil, dan kelestarian hutan dapat terus terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A.Y. 2015. 'Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kolaboratif sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Pengelolaan SDA di Hutan Sesat, Lombok Barat', *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(3), 91-100.
- Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- De Foresta, H., Kusworo, A., Michon, G., Djatmiko, W.A. 2000. *Ketika Kebun Berupa Hutan, Agroforest Khas Indonesia Sebuah Sumbangan Masyarakat*, International Centre for Research in Agroforestry; Institut de Recherche Pour le Developpement; Ford Foundation, Bogor.
- Febryano, I.G., Suharjo, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2014. 'The Roles and Sustainability of Local Institution of Mangrove Management in Pahawang Island', *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 20(2), 69-76.
- Mulyono, M.M.B. 2012. *Modal Sosial dalam Pengelolaan Kebun Hutan (Dukuh) di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*, Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Safe'i, R., Hardjanto, Supriyanto, Sundawati, L. 2015. 'Pengembangan Metode Penilaian Kesehatan Hutan Rakyat Sengon (*Falcataria moluccana* (Miq.) Barneby & J.W. Grimes)', *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 12 (3), 175-187.
- Santoso, H. 2011. 'Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Tafsir Setengah Hati Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Versi Kementerian Kehutanan RI', *Jurnal Kehutanan Masyarakat*, 3(1), 53-78.
- Salampessy, M. L., Bone, I., Febryano. I.G. 2012. 'Performansi Dusun Pala Sebagai Salah Satu Agroforestri Tradisional di Maluku', *Jurnal Tengawang*, 2, 55-65.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Suharjo, D., Khan, A., Djatmiko W.A, Sirait M.T., Evelyn S. 2000. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Kehutanan Masyarakat, Bogor.
- Suharjo D., Putro, H.R. 2013. *Pembangunan Kehutanan Indonesia Baru: Refleksi dan Inovasi Pemikiran*, IPB Press, Bogor.
- Suharjo, D. 2014. *Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Orasi Ilmiah Guru Besar IPB)*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Van Noordwijk, M., Agus, F., Suprayogo, D., Hariah, K., Pasya, G., Verbiest, B., Farida. 2004. 'Peranan Agroforestri dalam Mempertahankan Fungsi Hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS)', *Jurnal Agrivita*, 26(1), 1-8.